INDEKS SUBJEK

A

Analisis data panel 92, 141
APBN/APBD 182, 184, 194, 195
Asuransi gempa 16, 21, 22

B

Belanja pemerintah daerah 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207
Bea keluar 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 250
BBM bersubsidi 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224

D

Data mikro 119, 125, 126, 141
Debt sustainable framework 99

E

Ekonomi internasional 155
Ekstensifikasi 119, 120, 122, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138 139
Ekspor 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
External debt 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112 113, 114, 115, 116, 117

F

Fasilitas umum 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Female 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Foreign currency 99, 101, 102, 115, 117

H

Highest and best us 1, 2, 11, 13
Harga minyak mentah (ICP) 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

I

Income inequality 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Insentif pajak 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80
Investasi privat 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207

J

Jarak garis lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Jarak jalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

K

Kebijakan fiskal 125, 155, 156, 157, 161, 167
Kepatuhan pajak 120, 123
Kesempatan kerja 197, 198, 199, 201, 207
Konsumsi 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224
Kredit usaha rakyat 38, 39, 44

INDEKS SUBJEK

M

Model peramalan 155
Minyak sawit mentah

N

Nilai tukar 241, 242, 243, 244, 245, 248, 250, 251

P

Pajak properti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13
Penerimaan pajak 2, 3, 12
Pengeluaran listrik rumah tangga 141, 142, 143, 147, 149, 150,
Pengeluaran rumah tangga 15, 20, 25, 26, 27, 28
Perdagangan bilateral 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97
Pertumbuhan PDB 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Pertumbuhan penerimaan pajak 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80
Perubahan iklim 181, 182, 184, 195
Potensi pajak 120
Proyeksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Premi asuransi bencana 15, 19, 29, 32

R

Ratio 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 117
RAN-GRK 181, 182, 183,
Return to education 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Risiko fiskal 37, 38, 44, 50, 51, 52

S

Solvency 99, 100, 102, 103, 104, 108, 111, 114, 117
Sosiokultural 86, 87
Subsidi BBM 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218

T

Teori gravitasi 85, 88

U

Usaha mikro, kecil, dan menengah 38

W

Wajib pajak orang pribadi 120, 124, 137
Model peramalan 155
Minyak sawit mentah 241, 247, 248

N

Nilai tukar 241, 242, 245, 248, 250, 251

P

Pajak properti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13

No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012
Vol 18 No 3, Desember 2014

KEK

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Studi Pengarusutamaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia**
- **Performa Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Privat dan Kesempatan Kerja di Indonesia**
- **Efektivitas Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi di Jawa-Bali**
- ***Income Inequality : Education as The Panacea***
- **Dampak Bea Keluar terhadap Ekspor CPO Indonesia**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 18	No. 3	Desember 2014	Halaman : 181 - 254

ISSN 1410-3249

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

DAMPAK BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR CPO INDONESIA

Impact Tax Policy on CPO Exports

Makmun Syadullah
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, Indonesia
Email : makmunr@gmail.com

Naskah diterima: 22 Oktober 2014
Naskah direvisi: 18 November 2014
Disetujui diterbitkan: 3 Desember 2014

ABSTRACT

CPO is a strategic commodity in the global market, so that the condition and CPO prices in the domestic market is strongly influenced by the global market. This study aims to analyze several factors that affect CPO export, namely CPO price in the international market, the exchange rate rupiah against the US dollar and tax policy as stated in the PMK No. *128* / PMK.011 / 2011. Based on this research, in the period 2005-2013 Indonesia's CPO exports was influenced by the CPO price in the international market, the exchange rate rupiah against the US dollar and tax policy in 2011. Overall the model is able to explain that variation changes CPO exports in the period 2005-2013 by 73,73%t are influenced by the three variables used in this model, while the rest is influenced by other variables that are not included in this study observations. while the rest is influenced by other variables that are not included in this study observations.

Keywords : crude palm oil, exchange rate, export, tax policy

ABSTRAK

Produk CPO merupakan komoditas strategis di pasar global, sehingga kondisi dan harga CPO di pasar domestik sangat dipengaruhi oleh pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor CPO, yakni harga CPO di pasar internasional, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan kebijakan bea keluar sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 128/PMK.011/2011. Berdasarkan hasil penelitian, dalam periode 2005-2013 ekspor CPO Indonesia dipengaruhi oleh harga CPO di pasaran internasional, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan kebijakan bea keluar tahun 2011. Secara keseluruhan model mampu menjelaskan bahwa variasi perubahan ekspor CPO dalam periode 2005-2013 sebesar 73,73% dipengaruhi oleh ketiga variable yang dipakai dalam model ini, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak masuk dalam pengamatan penelitian ini.

Kata Kunci: bea keluar, ekspor, minyak sawit mentah, nilai tukar

JEL Classification: F4, H3, E4

I. PENDAHULUAN

Produk CPO merupakan komoditas strategis di pasar global, sehingga kondisi dan harga CPO di pasar domestik sangat dipengaruhi oleh pasar global. Produk CPO merupakan komoditas ekspor potensial dan memberikan kontribusi cukup besar bagi perolehan devisa. Dalam rangka meningkatkan

nilai tambah ekpor, pemerintah memacu industri untuk melakukan hilirisasi industri dengan fokus pada sektor serta komoditas yang menjadi andalan, yakni industri agro, migas, dan bahan tambang mineral.

Penelitian tentang dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor komoditas tertentu sudah banyak dilakukan. Secara umum penelitian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: *Pertama*, mereka menghitung pajak ekspor optimal (Akiyama 1992; Trivedi dan Akiyama 1992; Yilmaz 1999; Burger 2008; Permani, Vanzetti, dan Setyoko 2011). *Kedua* adalah mereka yang menganalisis pengaruh pajak ekspor pada kesejahteraan dan ekonomi (Marks, Larson, dan Pomeroy 1998; Hasan, Reed, dan Marchant 2001; Warr 2002; Susila 2004; Rifin 2010; Nyein et al 2010;. Pradiptyo et al 2011). Semua studi ini menunjukkan bahwa pajak ekspor akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan mengurangi daya saing.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amzul Rifin,(2012) menunjukkan bahwa harga petani ditentukan oleh harga internasional. Sementara itu, harga internasional hampir sempurna ditransmisikan ke harga petani. Hal ini menyebabkan petani memiliki posisi tawar lebih tinggi dari eksportir, khususnya setelah pelaksanaan pajak ekspor pada bulan April 2010 Dengan penerapan pajak ekspor, margin exportir semakin menurun karena persaingan yang semakin sengit dalam mendapatkan biji kakao dari petani.

Menurut Piermartini (2004) efek dari pajak ekspor tergantung pada kekuatan pasar. Negara-negara dengan kekuatan pasar yang menerapkan pajak ekspor memiliki lebih banyak berpengaruh pada harga internasional, volume perdagangan, distribusi pendapatan, dan *terms of trade* daripada negara tanpa kekuatan pasar. Sementara itu, dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional lebih parah ketika pajak ekspor diimplementasikan oleh negara tanpa kekuatan pasar (Devarajan et al. 1996). Jika suatu negara dengan kekuatan pasar menerapkan pajak ekspor, juga akan menderita kerugian efisiensi karena dampak distorsi dari pajak ekspor, namun *terms of trade* akan meningkatkan karena kenaikan harga ekspor (Piermartini 2004).

Hasil penelitian Prahastuti (2000) menunjukkan bahwa ekspor CPO dipengaruhi oleh harga CPO domestik, produksi CPO, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Sedangkan hasil penelitian Askadarimi (2007) menunjukkan bahwa harga riil CPO domestik, dan *dummy* kebijakan perluasan areal kelapa sawit bersifat responsif pada jangka panjang.

Widyanti (2007) melakukan analisis integrasi pasar CPO dunia dengan minyak goreng dan TBS domestik serta pengaruh tarif ekspor BBM dunia, bertujuan untuk menganalisis integrasi pasar CPO, minyak goreng, dan TBS domestik; pengaruh tarif ekspor dan harga BBM dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif ekspor merupakan bentuk ketidakefektifan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perkelapasawitan karena dengan adanya tarif ekspor, ekspor CPO akan berkurang.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Munadi (2007) dalam jangka pendek permintaan ekpor kelapa sawit oleh India sangat dipengaruhi oleh rasio antara harga minyak kedelai dan harga minyak kelapa sawit dunia..Penurunan pajak ekspor akan diikuti oleh meningkatnya jumlah minyak sawit yang diekspor.

Paper ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak bea keluar tahun 2011 terhadap ekspor CPO Indonesia. Disamping itu juga melihat dampak variabel-variabel lainnya yang diduga mempengaruhi ekspor CPO yakni harga CPO internasional dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Selanjutnya dalam *paper* ini juga akan dianalisis dampak kebijakan bea keluar terhadap perkembangan hilirisasi CPO di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dampak Pengenaan Bea Keluar terhadap Harga Barang

Dalam rangka mencapai tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, Pemerintah mengenakan pungutan atas barang ekspor tertentu. Dengan demikian pengenaan bea keluar akan berdampak negatif terhadap ekspor.

Menurut Mankiw (2003), kebijakan perdagangan merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang diekspor atau diimpor. Biasanya kebijakan perdagangan berbentuk melindungi industri domestik dari pesaing asing, baik dengan menerapkan pajak impor (tarif) atau membatasi jumlah barang dan jasa yang diimpor (kuota).

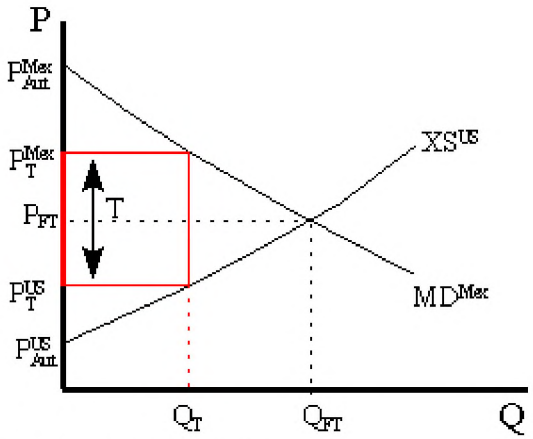

Sumber: Mankiw (2003)

Gambar 2.1. Dampak Bea Keluar pada Harga.

Gambar di atas menjelaskan bahwa secara ekstrim, apabila tidak ada bea keluar, maka ekpor akan mencapai sebesar Q_{FT} dengan harga sebesar P_{FT}. Apabila pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor barang sebesar

$$T = P^{Mex}_{Aut} - P^{US}_{Aut}$$

maka jumlah yang diperdagangkan akan turun menjadi Q_r. Dengan kata lain, bea keluar akan menghambat perdagangan internasional.

Kenaikan harga barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri cenderung mengurangi ekspor karena akan mendorong impor dan menekan ekspor. Jadi, apresiasi menghapus kenaikan ekspor yang langsung bisa dikaitkan dengan hambatan perdagangan. Kebijakan perdagangan proteksionis mempengaruhi jumlah perdagangan. Karena kurs riil terapresiasi, maka barang dan jasa yang diproduksi menjadi relatif lebih mahal terhadap barang dan jasa luar negeri. Pada tingkat yang sama, jumlah yang diekspor lebih sedikit. Karena ekspor tidak berubah, barang yang akan diimpor juga sedikit (apresiasi kurs riil akan mendorong impor, tetapi kenaikan impor ini hanya sebagian yang akan menghilangkan dampak penurunan impor yang disebabkan oleh adanya hambatan perdagangan). Jadi, kebijakan proteksionis mengurangi jumlah impor dan ekspor.

Penurunan jumlah perdagangan total merupakan alasan yang selalu digunakan para ekonom untuk menentang kebijakan proteksionis. Perdagangan internasional menguntungkan semua negara dengan memberikan kebebasan pada setiap negara untuk melakukan spesialisasi dan memberikan

setiap negara variasi barang dan jasa yang lebih beragam. Kebijakan proteksionis mengurangi manfaat perdagangan internasioal. Meskipun kebijakan ini menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kebijakan menaikkan PE untuk mendorong pertumbuhan industri hilir dilandasai pemikiran bahwa kenaikan PE akan lebih menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang lebih rendah. Kenaikan PE akan menghambat ekspor sehingga ketersediaan bahan baku di dalam negeri akan meningkat dengan harga yang lebih murah. Meskipun kebijakan ini menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kebijakan menaikkan PE untuk mendorong pertumbuhan industri hilir dilandasai pemikiran bahwa kenaikan PE akan lebih menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang lebih rendah. Kenaikan PE akan menghambat ekspor sehingga ketersediaan bahan baku di dalam negeri akan meningkat dengan harga yang lebih murah.

2.2. Kebijakan Bea Keluar CPO

Harga CPO dalam negeri sangat ditentukan oleh harga CPO internasional dan nilai tukar dollar terhadap rupiah. Harga CPO dunia yang tinggi merupakan daya tarik yang besar bagi pengusaha dalam negeri untuk mengekspor CPO dan menghindarkan diri dari kewajibannya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Begitu halnya dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar, semakin lemah nilai tukar rupiah, maka pengusaha dalam negeri semakin bergairah untuk melakukan ekspor. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya pasokan CPO bagi industri dalam negeri, terutama minyak goreng, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga minyak goreng.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan CPO dalam negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri pemerintah mengeluarkan kebijakan bea keluar terhadap barang ekspor.

Kebijakan bea keluar sudah dimulai sejak 1974 yang lebih dikenal dengan pajak ekspor, namun mulai menjadi perhatian dalam perdagangan CPO pada tahun 1994 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 439/KMK.017/1994. Pada tahun 1997, melalui Surat Keputusan Memperindag Nomor 456/MPP/Kep/12/1997 Pemerintah hanya membolehkan 15 perusahaan yang ditunjuk melakukan ekspor dengan kuota 25 persen dari total produksi. Ekspor CPO dan produk turunannya baru boleh diekspor kembali secara bebas pada tahun 1998 melalui Surat Keputusan Memperindag Nomor 181/MPP/Kep/4/1998. Perkembangan selengkapnya kebijakan terkait dengan ekspor CPO dapat dilihat pada lampiran.

Pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor. Berdasarkan PMK 92/PMK.02/2005 tarif pungutan ekspor ditetapkan sebesar 3 persen. Pada tahun 2007 pemerintah memberlakukan tarif progresif.

Pada tahun 2006 pemerintah mengubah penggunaan istilah pajak ekspor menjadi bea keluar. Pemberlakuan bea keluar di Indonesia diawali dengan diaturnya pengenaan bea keluar terhadap ekspor barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang efektif mulai berlaku 1 Januari 2009 dengan tarif progresif. Tidak ada perbedaan antara pajak ekspor dengan bea keluar, perbedaan hanya pada penambahan dengan lebih memerinci beberapa jenis produk turunannya. Sedangkan pokok barang yang dikenakan bea keluar tidak mengalami perubahan.

Pemerintah terus melakukan restrukturisasi struktur tarif bea keluar untuk mendukung hilirisasi

industri sawit. Sebelumnya produk hulu dan hilir kelapa sawit dikenakan tarif bea keluar sama. Dengan restrukturisasi produk hulu dikenakan tarif bea keluar lebih tinggi dari produk hilir dengan selisih yang signifikan. Kebijakan tarif bea keluar untuk hilirisasi sawit dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2011 dan mulai berlaku 14 September 2011. Mengingat PMK 128/2011 mengatur barang ekspor lain yang dikenakan bea keluar sehingga PMK 128/2011 telah mengalami perubahan dua kali yakni dengan PMK 75/2012 dan PMK 128/2013. Namun susunan tarif bea keluar minyak sawit dan produk turunannya tidak mengalami perubahan.

III. METODOLOGI

3.1. Metode Analisis

Penelitian ini akan mencoba suatu model untuk menganalisis bagaimana pengaruh harga CPO di pasar dunia, nilai tukar USD terhadap rupiah dan kebijakan bea keluar terhadap kuantitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO). Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Log\ (export) = \beta 0 + \beta 1 Log\ (P_Intern) + \beta 2\ Log\ (Log\ (ER) + Dummy$$

Dimana:

Y	= jumlah ekpor CPO
P_Intern	= harga CPO internasional
ER	= nilai tukar rupiah USD terhadap rupiah
Dummy	= adalah *dummy* viabel, untuk mengukur dampak bea keluar (PMK Nomor 128/PMK.011/2011) terhadap eskpor CPO

Sebuah model ekonometrik seperti yang ditunjukkan oleh persamaan di atas pada akhirnya akan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Dalam analisis ekonometrik modern, jika menggunakan data deret waktu (*time series*), mensyaratkan data yang digunakan harus stationer. Sebuah data deret waktu dikatakan stasioner jika nilai rata-rata galat sama dengan nol dan nilai varians (*variance)* dari peubah yang bersangkutan konstan sepanjang waktu (Ramanathan, 2001). Uji stationer data penting dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran asumís regresi. Masalah utama yang terjadi apabila data yang digunakan di dalam analisis regresi tidak stasioner, nilai dugaan yang dihasilkan menjadi bias (*spurious regression),* sehingga menimbulkan kesalahan dalam interpretasi hasil analisis. Untuk menanggulagi masalah data yang tidak stationer, beberapa kajian terdahulu telah menyarankan penggunaan konsep deferensial (*differencial*) data untuk menghilangkan *unit root* walaupun penggunaan metode ini masih menimbulkan perdebatan karena akan menghilangkan informasi jangka panjang yang sangat penting.

Dalam kajian ini untuk menguji kondisi apakah data *stationer* atau tidak *stationer* dilakukan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF). Jika variabel yang digunakan ternyata tidak *stationer*, maka dalam penelitian kita tidak dapat menggunakan OLS. Data yang *stationer* diketahui setelah dilakukan pengujian *unit root*. Adapun yang dimaksud dengan pengujian unit *root* adalah menguji apakah data yang digunakan memiliki *error* yang konstan, dan tidak terpengaruh oleh waktu serta variabel lainnya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah metode *Dickey-Fuller*.

Selanjutnya untuk menguji bahwa apakah model terbebas dari *autocorelasi* dan *heteroskedasticity*, dalam *paper* ini akan digunakan uji uji statistik dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dan uji *heteroskedasticity test Glejser*.

3.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat

Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Kemeneterian Keuangan. Rentang waktu pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2005-2013.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Ekpor Sawit

Salah satu andalan ekspor Indonesia adalah minyak sawit (*crude palm oil* -CPO). Hal ini sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara produsen CPO terbesar di dunia. Menurut Ditjen Bina Produksi Perkebunan, Kementerian Pertanian, total produksi CPO pada tahun 2005 mencapai 14,1 juta ton dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 26 juta ton. Dengan demikian dalam periode 2005-2013 rata-rata produksi CPO meningkat sebesar 10,55 persen.

Sebelum 2005 Indonesia merupakan produsen CPO kedua terbesar di dunia setelah Malaysia. Namun sejak tahun 2006, jumlah produksi CPO Indonesia telah melebihi Malaysia. Pada tahun 2012 produksi CPO Indonesia jauh di atas Malaysia yang hanya mencapai 18,8 juta ton.

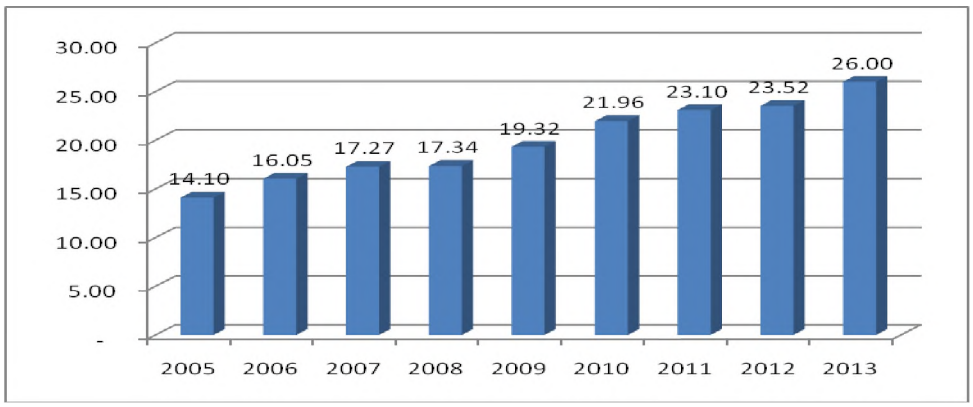

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, diolah

Gambar 4.1. Perkembangan Produksi CPO Indonesia 2005-2013.

Sementara itu dari sisi ekspor, dalam periode 2005-2013 ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan dari 5,7 juta ton (2005) menjadi 9,57 juta ton (2009), namun sejak 2010 terus mengalami penurunan hingga akhirnya pada tahun 2013 hanya mencapai 6,62 juta ton. (lihat Gambar 4.1). Namun apabila dibandingkan dengan prosentase kenaikan produksi, prosentase kanaikan ekspor CPO jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan kebutuhan CPO dalam negeri pada periode yang sama juga mengalami peningkatan.

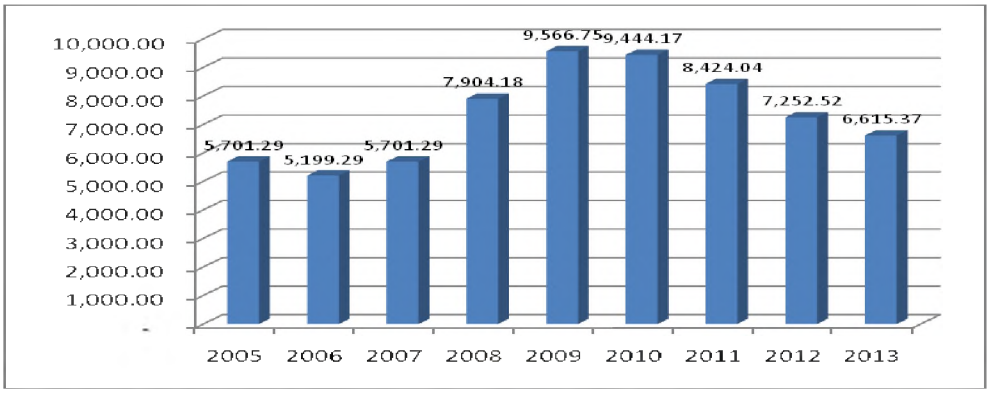

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, diolah

Gambar 4.2. Perkembangan Ekspor CPO Indonesia 2005-2013.

Berdasarkan data produksi dan ekspor CPO di atas, nampak bahwa porsi ekspor CPO dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2005 porsi ekspor CPO mencapai 40,43 persen dan puncaknya pada tahun 2009 yang mencapai 49,53 persen. Sejak 2010 porsi ekspor CPO terus menurun sehingga pada tahun 2013 diperkirakan hanya mencapai 25,46 persen.

Produk CPO merupakan komoditas strategis di pasar global, sehingga kondisi dan harga CPO di pasar domestik sangat dipengaruhi oleh pasar global. Produk CPO merupakan komoditas ekspor potensial dan memberikan kontribusi cukup besar bagi perolehan devisa.

Berdasarkan *The United States Departemen of Agricultural* total produksi CPO pada tahun 2012 di seluruh dunia mencapai 62,24 juta ton. Dari total produksi tersebut Indonesia menyumbang 53,73 persen, Malaysia 32,64 persen, Thailand 3,61 persen, Colombia 1,64 persen, dan Nigeria 1,49 persen.

Dari gambaran di atas, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia dan pada tahun 2012. Dunia berharap Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan CPO dunia. Hal ini disebabkan Malaysia sebagai salah satu pemasok CPO terbesar dunia tidak lagi memiliki lahan pengembangan yang baru, hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas (USDA, 2011).

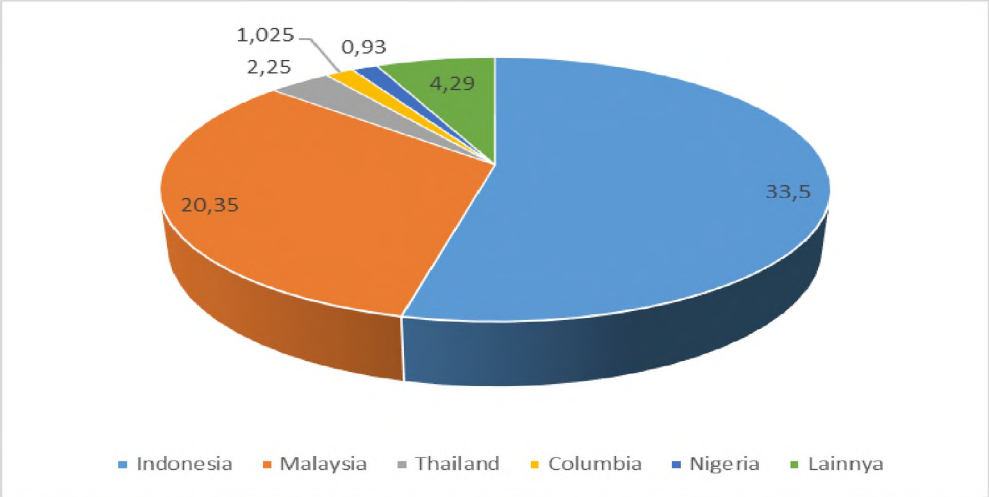

Sumber: *The United States Departemen of Agricultural*, diolah

Gambar 4.3. Produksi CPO Seluruh Dunia Tahun 2012 (Juta Ton).

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekspor, pemerintah memacu industri untuk melakukan hilirisasi industri dengan fokus pada sektor serta komoditas yang menjadi andalan, yakni industri agro, migas, dan bahan tambang mineral. Dalam konteks hilirisasi industri agro, khususnya minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO), Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia saat ini baru bisa menghasilkan 47 produk turunan CPO, sedangkan Malaysia sudah mencapai 100 produk turunan.

Salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi CPO adalah melalui pengenaan bea keluar (BK) CPO. Sejak Januari 2009 pemerintah menerapkan bea keluar ekspor untuk minyak sawit mentah (CPO). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 214/PMK.08/2008 tentang Pungutan Bea Keluar yang mulai diberlakukan 1 Januari 2009. Selanjutnya PMK ini terus diperbaharui sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Terakhir PMK Nomor 67/PMK.011/2010 diubah kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

4.2. Perkembangan Hilirisasi Kelapa Sawit

Sejak diberlakukannya bea keluar atas CPO pada Januari 2009, ekspor CPO Indonesia mengalami penurunan. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa tahun pertama sejak diberlakukannya bea keluar, ekspor CPO masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan, bahkan mengalami peningkatan. Penurunan ekspor CPO mulai efektif terutama sejak 2011 dengan dikeluarkannya PMK Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang-Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

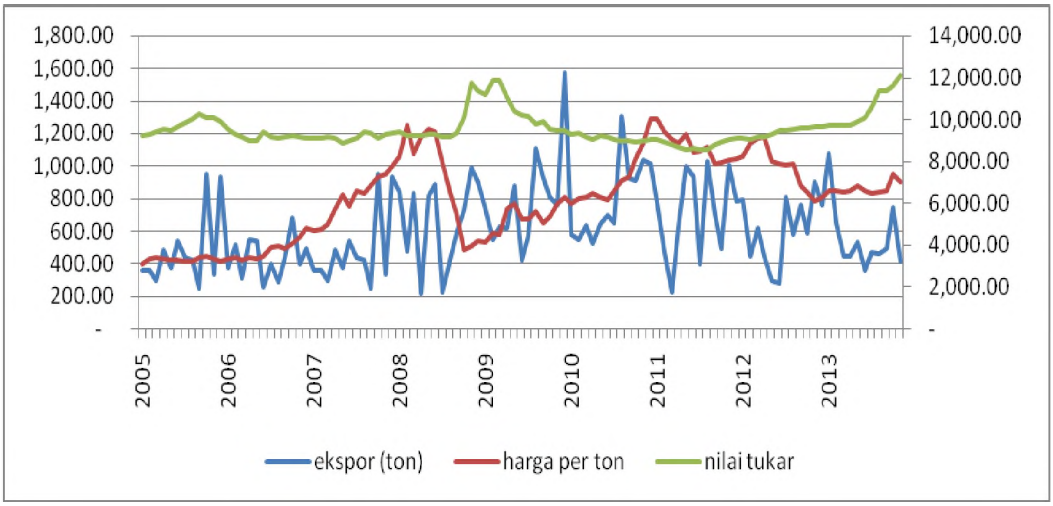

Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.4. Perkembangan Ekspor CPO, Harga CPO dan Nilai Tukar Periode Januari 2005-Desember 2013.

Dalam rangka mempercepat program hilirisasi CPO, pemerintah pada tahun 2013 mengeluarkan PMK Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/KMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dab Tarif Bea Keluar. PMK ini merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit, karena menjamin pasokan bahan baku minyak sawit mentah bagi industri dalam negeri.

Beberapa dampak positif keberadaan PMK Nomor 128/PMK.011/2013 adalah sebagai berikut: (i) telah terjadi penambahan ragam produk hilir dari hanya 54 jenis pada tahun 2011 menjadi 149 jenis pada awal 2014 (*oleofood, oleochemical, biofuel*), (ii) masuknya investasi lebih dari Rp 30 triliun di sektor industri pengolahan minyak sawit, (iii) komposisi ekspor produk mentah (CPO/CPKO) dengan produk hilir berubah dari 60 persen berbanding 40 persen pada tahun 2011 menjadi 40 persen dan 60 persen pada akhir 2013, (iv) utilisasi industri minyak goreng yang semula hanya 45% pada tahun 2011 meningkat menjadi 73 persen pada tahun 2013 dengan kapasitas produksi total mencapai 23 juta ton CPO, dan (v) pasokan dan harga minyak goring di dalam negeri sebagai salah satu bahan pokok pangan sangat terjamin dengan stabilitas yang terjaga dengan baik.

4.3. Analisis Regresi

Dalam kajian ini, tahap pertama dalam analisis data adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung unit *root* yang berarti bahwa data harus *stationer* dengan menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dan uji *Phillips-Perron* (PP). Tabel 4.1 menyajikan hasil uji unit *root* dengan menggunakan uji ADF.

Berdasarkan hasil uji unit *root* pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa semua *variable* harga internasional (p_intern) dan nilai tukar rupiah terhadap USD stasioner pada *first difference*, sedangkan *variable* ekpor (*export*) stasioner pada *level*.

Tabel 4.1. Uji Unit *Root* untuk Data Stasioner

Variabel	*Augemented-Dicky Fuller Test Statistic*	
	Level	***1st Difference***
export	-3,6906*	-1,4191
er	-2,5088	-3,1037**
p_intern	-2,5089	-3,1037**
Critical value		
1%	-4,8035	
5%	-3,4033	
10%	-2,8182	

Sumber: Data BPS, BI dan Kemendag, diolah

Keterangan: * signifikan pada 5%
** signifikan pada 10%

Hasil uji statistik terhadap kondisi autokorelasi dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dan uji *heteroskedasticity test*: *Glejser* menunjukkan bahwa *Prob. Chi-Square* jauh di atas nilai kritis pada 5 persen. Dengan demikian, berdasarkan semua uji-uji tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan *vector* dalam persamaan ekspor tidak ada autokorelasi, struktur yang stabil namun tidak didistribusikan secara normal.

Tabel 4.2. Uji Autokorelasi dengan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*

F-statistic	0.280774	Prob. F(2,3)	0.7731
Obs*R-squared	1.419026	Prob. Chi-Square(2)	0.4919

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/17/14 Time: 10:52
Sample: 2005 2013
Included observations: 9
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.875307	8.987564	0.431186	0.6954
LOG(P_INTERN)	0.087544	0.218326	0.400980	0.7153
LOG(ER)	-0.487933	1.058026	-0.461173	0.6761
D2	0.034680	0.140031	0.247659	0.8204
RESID(-1)	-0.556160	0.900499	-0.617613	0.5805
RESID(-2)	-0.402382	0.668122	-0.602258	0.5895

R-squared	0.157670	Mean dependent var	-2.12E-15
Adjusted R-squared	-1.246215	S.D. dependent var	0.100181
S.E. of regression	0.150145	Akaike info criterion	-0.719705
Sum squared resid	0.067631	Schwarz criterion	-0.588222
Log likelihood	9.238673	Hannan-Quinn criter.	-1.003445
F-statistic	0.112310	Durbin-Watson stat	1.807236
Prob(F-statistic)	0.981060		

Sumber: Data BPS, BI dan Kemendag, diolah

Tabel 4.3. *Heteroskedasticity Test: Glejser*

F-statistic	1.141092	Prob. F(3,5)	0.4173
Obs*R-squared	3.657661	Prob. Chi-Square(3)	0.3009
Scaled explained SS	1.946379	Prob. Chi-Square(3)	0.5836

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 10/17/14 Time: 10:55
Sample: 2005 2013
Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.983746	2.607911	-0.760665	0.4812
LOG(P_INTERN)	0.095630	0.062032	1.541617	0.1838
LOG(ER)	0.158150	0.286970	0.551103	0.6053
D2	-0.068054	0.047185	-1.442259	0.2088

R-squared	0.406407	Mean dependent var	0.076263
Adjusted R-squared	0.050251	S.D. dependent var	0.059104
S.E. of regression	0.057600	Akaike info criterion	-2.569499
Sum squared resid	0.016589	Schwarz criterion	-2.481844
Log likelihood	15.56275	Hannan-Quinn criter.	-2.758659
F-statistic	1.141092	Durbin-Watson stat	3.650570
Prob(F-statistic)	0.417315		

Sumber: Data BPS, BI dan Kemendag, diolah

Berdasarkan hasil analisis dengan merode regresi diperoleh hasil bahwa dalam periode 2005-2013 ekspor CPO Indonesia dipengaruhi oleh harga CPO di pasaran internasional (harga kontrak Amseterdam), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan kebijakan bea keluar CPO tahun 2011.

Tabel 4.4. Hasil Regresi

Dependent Variable: LOG(EXPORT)
Method: Least Squares
Date: 10/09/14 Time: 15:54
Sample: 2005 2013
Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.137581	5.737455	-1.069739	0.3336
LOG(P_INTERN)	0.595254	0.136472	4.361736	0.0073
LOG(ER)	1.219915	0.631339	1.932265	0.1112
Dummy	-0.325454	0.103809	-3.135123	0.0258

R-squared	0.835852	Mean dependent var	8.871370
Adjusted R-squared	0.737363	S.D. dependent var	0.247268
S.E. of regression	0.126720	Akaike info criterion	-0.992567
Sum squared resid	0.080290	Schwarz criterion	-0.904911
Log likelihood	8.466550	Hannan-Quinn criter.	-1.181727
F-statistic	8.486772	Durbin-Watson stat	2.229684
Prob(F-statistic)	0.020891		

Sumber: Data BPS, BI dan Kemendag, diolah

Setiap harga CPO di pasaran internasional naik 1 persen, ekspor CPO juga mengalami peningkatan sebesar 0,5952 persen. Setiap nilai tukar rupiah melemah 1 persen terhadap dollar Amerika, maka ekspor CPO naik sebesar 1,2199 persen. Sedangkan kebijakan bea keluar CPO tahun 2011 mampu menahan laju pertumbuhan ekspor CPO sebesar 0,3254 persen.

Pengaruh harga CPO internasional dan kebijakan bea keluar CPO tahun 2011 terhadap ekspor signifikan pada α sebesar 5 persen, sedangkan pengaruh nilai tukar terhadap ekspor signifikan pada α sebesar 15 persen. Secara keseluruhan model mampu menjelaskan bahwa variasi perubahan ekspor CPO dalam periode 2005-2013 sebesar 73,73 persen dipengaruhi oleh ketiga *variable* yang dipakai dalam model ini, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh *variable* lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil kajian dapat dsimpulkan bahwa ekspor CPO Indonesia dalam periode 2005-2013 secara signifikan dipengaruhi oleh harga CPO di pasaran internasional, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan kebijakan bea keluar CPO tahun 2011.

Setiap harga CPO di pasaran internasional naik 1 persen, ekspor CPO juga mengalami peningkatan sebesar 0,5952 persen. Setiap nilai tukar rupiah melemah 1 persen terhadap dollar Amarika, maka ekspor CPO naik sebesar 1,2199 persen. Sedangkan kebijakan bea keluar CPO tahun 2011 mampu menahan laju pertumbukan ekspor CPO sebesar 0,3254 persen.

Berdasarkan temuan di atas, kebijakan bea keluar sebaiknya tetap dilanjutkan, mengingat dampaknya terhadap program hilirisasi cukup berhasil. Sejak dikeluarkannya PMK Nomor 128/PMK.011/2011 komposisi ekspor CPO Indonesia telah mengalami perubahan dari ekspor produk mentah (CPO/CPKO) dengan produk hilir berubah dari 60 persen berbanding 40 persen pada tahun 2011 menjadi 40 persen dan 60 persen pada akhir 2013. Ke depan, kebijakan bea keluar sebaiknya juga diperluas untuk diterapkan bukan saja untuk kepentingan hilirisasi, namun juga untuk tujuan konservasi lingkungan dan pengendalian terkurasnya cadangan sumber daya alam, misalnya batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Akiyama, Takamasa. (1992). Is There a Case for an Optimal Export Tax for Perennial Crops. *Policy Research Working Paper*, World Bank.

Amzul *Rifin*, (2012)., Impact of Export Tax Policy on Cocoa Farmers and Supply Chain, *SEADI Discussion Paper* No. 1

Askadarimi, I. (2007). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Minyak Sawit (CPO) Indonesia*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Burger, K. (2008). Optimal export taxes: the case of cocoa in Cote d'Ivoire. Paper presented at the 107th EAAE Seminar "Modelling of Agricultural and Rural Development Policies", Sevilla, Spain, European Association of Agricultural Economists.

Ernawati Munadi, (2007), Penurunan Pajak Ekspor dan Dampaknya terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit *Indonesia* Ke India (Pendekatan Error Correction Model), dimuat dalam *Informatika Pertanian Volume 16 No. 2*.

Hasan, Mohamad F, Michael R. Reed and Mary A. Marchant. (2001). Effects of an Export Tax on *Competitiveness*: The Case of the Indonesian Palm Oil Industry. *Journal of Economic Development*, Vol 26(2),pp77 – 90

Intan, Eka K.P, Widyastutik, Amzul Rifin, Sri Hartoyo dan Heny Daryanto, (2008). Kebijakan Pungutan *Ekspor Crude Palm Oil* Kelapa Sawit: Perkembangan Dan Mekanisme Pemungutannya. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian* (Volume 2. No 1 – Juni).

Mankiw. (2003). *Teori Makroekonomi*. Edisis ke-5. Erlangga. Jakarta.

Marks, Stephen V, Donald F Larson and Jacqueline Pomeroy. (1998). Economic Effects of Taxes on *Exports* of Palm Oil Products. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 42(3), pp7-58.

Nyein, *Khin* Myo, Prapinwadee Sirisupluxana and Boonjit Titapiwatanakun. (2010). Welfare Effects of Export Tax Implications on Sesame in Myanmar. *Journal of Global Business and Economics*, Vol 1(1),p162-179.

Permani, Risti, David Vanzetti and Nur Rakhman Setyoko. (2011). Optimum Level and Welfare Effects of *Export* Taxes for Cocoa Beans in Indonesia: A Partial Equilibrium Approach. Paper presented at the 2011 AARES Annual Conference 8-11 February 2011 in Melbourne.

Pradiptyo, Rimawan, Tri Widodo and Amirullah Setya Hardi. (2011). Evaluasi Kebijakan Bea Keluar Biji *Kakao* di Indonesia (Cocoa's Export Tax Policy Evaluation). Penelitian Pelatihan Ekonomika dan Bisnis, Gadjah Mada University.

Prahastuti, I. (2000). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perdagangan *CPO*, serta Keterkaitan Pasar *CPO* dan Minyak Goreng Sawit. Skripsi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rifin, *Amzul*. (2010). The Effect of Export Tax on Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) Export Competitiveness. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol 27(2), pp173-184.

Susila, *Wayan* R. (2004b). Impacts of CPO-Export Tax on Several Aspects of Indonesian CPO Industry. *Oil Palm Industry Economic Journal*, Vol 4(2), pp1-13。

Trivedi, *Pravin* K and Takamasa Akiyama. (1992). A Framework for Evaluating the Impact of Pricing Policies for Cocoa and Coffee Cote d'Ivoire. The Work Bank Economic Review, Vol 6(2),pp307-330.

Yilmaz, K. (1999). Optimal Export Taxes in a Multi-country Framework. *Journal of Development Economics,* Vol 60(2), pp439-465.

Warr, *Peter* G. (2002). Export Taxes and Income Distribution: The Philippines Coconut Levy. *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol 138(3),pp.437-458.

Widyanti, S. (2007). Analisis Intergrasi Pasar *CPO* Dunia dengan Pasar *CPO*, Minyak Goreng dan TBS *Domestik* serta Pengaruh Tarif Ekspor *CPO* dan Harga BBM Dunia. Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2011/06/Malaysia

LAMPIRAN

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan *Crude Palm Oil* (CPO) di Indonesia

No	Periode	Dasar Kebijakan Pemerintah	Materi Kebijakan
1	1978-1991	SKB Mendagkop, Mentan dan Menperindag No 275/KPB/XIII/1978 764/Kpts/12/1978 252/U/SK/1978 Tanggal 16 Desember 1978	Digunakan instrumen a. alokasi bagi kebutuhan dalam negeri b. Ditetapkan harga CPO untuk penjualan dalam negeri c. Diperlukan ijin dari Dept. Perdagangan untuk ekspor Catatan: Mei 1986 ditambah dengan instrumen PE yang akhirnya mulai Mei 1991 dihapuskan lagi, termasuk alokasi kebutuhan DN
2	1991-1994	SKB Mendag, Mentan, Menperin No. 136/KPB/VI/1991 340/Kpts/KB.320 VI/1991 50/M/SK/6/1991 Mei 1991	SKB 16 Desember 1978 dicabut, berarti perdagangan dan ekspor CPO dibebaskan 3
3	1994-1997	SK Menkeu No. 439/KMK.017/1994 Tanggal 31 Agustus 1994	Ditetapkan PE progresif bagi CPO dan produk olahannya Catatan: Mei 1995 ditugaskan membentuk kesediaan penyanggah. Bekerja sama dengan Bimoli, Bulog melakukan operasi pasar.
4	1997-1998	SK Menkeu No. 300/KMK/1997 Tanggal 4 Juli 1997	Pajak ekspor diturunkan dari 40 s/d 60% menjadi 2 s/d 5% dan tidak progresif.
		SK Menperindag No. 456 /MPP/Kep/12/1997 tgl 17-12-97	Kewajiban produsen memasok CPO untuk kebutuhan dalam negeri.
		Surat Menkeu No.622 /KMK.01/1997 tgl 17-12-1997	Produsen ekspor CPO namun belum memenuhi kewajiban memasok kebutuhan DN dikenakan PE tambahan 28% - 30%
		Surat Ditjen Dagri No. 420 /DJPDN/XII/1997 tgl 24-12-97	CPO dan produk-produknya produksi bulan Januari s/d Maret 1998 hanya untuk kebutuhan DN
		SK Menperindag No. 102/MPP/Kep/2/1998 Tanggal 26 Februari 1998	Mencabut SK tanggal 17 Desember Produksi CPO dan turunannya hanya untuk kebutuhan dalam negeri sampai harga DN stabil.
		SK Menperindag No 181/ MPP/Kep/4/1998 tgl 17 April 98	Perdagangan CPO dan produk-produknya dinyatakan bebas
		SK Menkeu No. 242 /KMK.01/1998 tgl 22 April 98	Pajak ekspor dinyatakan berkisar antara 15% - 40% 5
5	2001	SK Menkeu 66/KMK.017/2001	Pajak ekspor CPO 3 %

No	Periode	Dasar kebijakan Pemerintah	Materi Kebijakan
6	2005	SK Menkeu 130/KMK. 010/2005	Pajak ekspor CPO 1,5 %
		PP No.35 tahun 2005	Penetapan barang ekspor tertentu oleh Menkeu. Tujuan pengenaan PE (pasal 2 ayat 2) yaitu: a. Menjamin kebutuhan DN b. Melindungi kelestarian SDA c. Antisipasi kenaikan harga di pasar International d. Menjaga stabilitas harga DN
7	2006	SK Menperindag No. 17/M-Dag/Per/3/2006 Tanggal 29 maret 2006	a. HPE ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Dirjen Perdagangan LN. b. HPE berlaku 10 April - 9 mei 2006: US $ 362/MT
		SK Menperindag No. 21/M-Dag/Per/5/2006 tgl 8-5- 2006	HPE berlaku satu bulan mulai 10 Mei-9Juni 2006, yaitu US $ 358/MT
8	2008	PMK No. 223/PMK.011/2008	Bea Keluar mulai berlaku 1 Januari 2009 dengan tariff progresif
9	2011	PMK No. 128/PMK.011/2011	Pengenaan bea keluar atas campuran dari CPO dan produk turunannya dan mulai berlaku 14 September 2011
10	2012	PMK No. 75/2012	Penyempurnaan uraian dan kelompok barang dan produk turunannya
11	2013	PMK No. 128/2013	Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan arif bea keluar

Sumber: Intan, dkk (2008) dan Kementerian Keuangan, diolah